



GENERASI
MELEK
POLITIK

LAPORAN PARTISIPASI POLITIK ANAK MUDA TERHADAP ISU LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU



© Yayasan Partisipasi Muda, 2021

Tim Penulis:

Belinda Sahadati Amri
Arief C. Nugraha
Mita Putri Novita Sari
Erlangga Saputra

Penanggung Jawab:

Neildeva Despendya

Desain Tampilan:

Ersa Mauliza

Terimakasih kepada:

Dr. Alfindra Primaldi selaku konsultan dalam riset ini

Informasi Kontak:

admin@partisipasimuda.org

Sekilas Desain Cover:

Apapun pekerjaan kamu, kamu akan tetap terdampak
dari masalah lingkungan yang ada di sekitar mu.
Jadi mulai menyuarakannya ke pemerintah daerah ya!

KATA PENGANTAR

Sebagai organisasi non-profit yang memiliki misi untuk memberikan edukasi politik bagi anak muda (17-25 tahun), Yayasan Partisipasi Muda atau “Generasi Melek Politik” ingin **membangun kesadaran kepada anak muda bahwa politik bisa mempengaruhi kualitas lingkungan hidup kita.**

Apa hubungannya dengan politik? Karena **Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) bisa menentukan nasib lingkungan kita.** Kepala daerah sebagai aktor yang terpilih secara demokratis memiliki kuasa besar untuk membuat kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dan pelestarian kawasan hutan dan juga lingkungan akan sangat bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah.

Hal ini membuat Generasi Melek Politik ingin memberikan kesadaran (*awareness*) kepada anak muda yang tinggal di daerah yang masih memiliki hutan yang luas seperti Provinsi Riau. Bahwa **bencana alam yang selama ini dialami seperti banjir dan longsor, disebabkan oleh peran pemimpin daerahnya juga, yang asal memberi izin.** Keberlanjutan hutan tidak dipikirkan, sehingga keluarlah izin penggunaan lahan yang moratorium.

Sebagai anak muda, kita harus memilih kepala daerah atau kepala negara yang “melek” terhadap perlindungan lahan hutan. Agar hutan tidak rusak oleh praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah maupun pejabat pemerintahan lainnya.

Laporan survey ini dibuat untuk memetakan masalah-masalah lingkungan dari mata anak muda di 4 provinsi di Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Riau. Generasi Melek Politik ingin melihat sejauh mana anak muda di 4 provinsi “rawan” tersebut sadar akan permasalahan lingkungan di depannya, yang juga ternyata berkaitan dengan politik. Harapannya, pemetaan masalah ini bisa digunakan untuk sesama komunitas, non-profit, lembaga riset, ataupun pemerintah, untuk menjadikan perlindungan hutan sebagai prioritas pembuatan kebijakan dan program kerja. Sehingga, siapapun yang ingin maju sebagai bupati ataupun gubernur kedepan, memprioritaskan perlindungan hutan dan

KATA PENGANTAR

tidak berani melakukan praktik korupsi izin lahan. Generasi Melek Politik ingin masalah ini diketahui sebanyak-banyaknya anak muda di Indonesia, sehingga kita bisa bergandengan tangan untuk memilih dan mengawasi kepala daerah yang sedang memimpin.

Kami sangat berterimakasih atas partisipasi komunitas dan non-profit organization di Provinsi Riau yang telah berkontribusi di pembuatan laporan ini, yaitu: **WALHI Riau, Perkumpulan Elang, Fitra Riau, Sedagho Siak, Politik Kemarin Sore, Green Generation Siak, Forum Anak Siak, Komunitas Menulis Siak, Petani Muda, Teras Riau, Rumah Kreatif Siak** dan juga perwakilan dari universitas seperti **Himpunan Kampus Siak Bersatu dan UIN Sultan Syarif Kasim Riau**.

Semoga laporan ini bisa bermanfaat untuk Indonesia kedepan, agar hutan kita lebih terjaga dan kepala daerah kita lebih “melek” lingkungan.

**DIREKTUR EKSEKUTIF
YAYASAN PARTISIPASI MUDA**

NEILDEVA DESPENDYA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	5
Daftar Tabel dan Diagram	6
Ringkasan Eksekutif	8
01 PENDAHULUAN	9
Latar Belakang	10
Metodologi Penelitian	13
02 PEMBAHASAN	16
Permasalahan Lingkungan Di Provinsi Riau	17
Peran Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Lingkungan Di Provinsi Riau	24
Peran dan Partisipasi Anak Muda dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan di Provinsi Riau	28
03 PENUTUP	30
Kesimpulan	34
Saran	35
Daftar Pustaka	36

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

Tabel	Tabel 1.1	Persebaran Demografi Responden	14
	Tabel 2.1	Arah Kebijakan Sektor Lingkungan Hidup Dalam Rpjmd Riau 2019-2024	24
	Tabel 2.2	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Riau 2016-2019	26
Diagram	Diagram 1.1	Minat Anak Muda Di Riau Terhadap Isu Lingkungan	20
	Diagram 1.2	Tingkat Persepsi Anak Muda Terhadap Dampak Permasalahan Lingkungan Di Provinsi Riau	23
	Diagram 2.1	Tingkat Persepsi Anak Muda Terhadap Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Masalah Lingkungan Di Provinsi Riau	27
	Diagram 2.2	Tingkat Persepsi Anak Muda Terhadap Keberhasilan Kebijakan Lingkungan Di Riau	27
	Diagram 3.1	Tingkat Persepsi Anak Muda Pelibatan Anak Muda Dalam Penyusunan Kebijakan Lingkungan Di Provinsi Riau	29
	Diagram 3.2	Tingkat Pelibatan Anak Muda Dalam Penyusunan Kebijakan Lingkungan Hidup Di Provinsi Riau	29
	Diagram 3.3	Tingkat Pengeluaran Partisipasi/ Pendapat Anak Muda Dalam Isu Lingkungan Di Provinsi Riau	30
	Diagram 3.4	Tingkat Persepsi Anak Muda Mengenai Pengaruh Aspirasi/	30

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

	Pendapat Anak Muda Terhadap Pembuatan Kebijakan Lingkungan Di Provinsi Riau	
	Diagram 3.5 Tanggapan Pemerintah Terhadap Pendapat/Aspirasi Anak Muda Di Provinsi Riau	31
	Diagram 3.6 Partisipasi Anak Muda Dalam Kegiatan Organisasi Lingkungan Di Provinsi Riau	32
	Diagram 3.7 Tingkat Harapan Anak Muda Di Provinsi Riau Terhadap PILKADA 2020	33
Grafik	Grafik 1.1 Jenis-Jenis Masalah Lingkungan Yang Terjadi Di Provinsi Riau Dalam Pandangan Anak Muda	21
	Grafik 1.2 Sumber Informasi Permasalahan Lingkungan Di Provinsi Riau Bagi Anak Muda	22
	Grafik 1.3 Penyebab Permasalahan Lingkungan Di Provinsi Riau	22
	Grafik 1.4 Dampak Masalah Lingkungan Di Provinsi Riau	24
	Grafik 3.1 Media Yang Digunakan Anak Muda Untuk Mengeluarkan Aspirasi/ Pendapat Tentang Isu Lingkungan Di Riau	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Riau merupakan provinsi yang dengan kekayaan sumber daya alam dan hayati-nya. Namun demikian, banyak pula permasalahan lingkungan yang terjadi di provinsi ini. Kerusakan lingkungan tersebut memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Provinsi Riau, tidak terkecuali anak muda.

Dengan melihat besarnya dampak kerusakan lingkungan yang terjadi di Provinsi Riau, tidak mengherankan jika dari 632 responden anak muda, 98% menyatakan bahwa mereka mengetahui terkait masalah lingkungan di daerah tersebut. Yang mana, 89% responden menyatakan bahwa masalah isu tersebut merupakan isu penting yang harus diperhatikan oleh semua kalangan masyarakat. Untuk permasalahan lingkungan yang paling banyak diketahui oleh responden anak muda adalah sampah yang menumpuk (69%), kerusakan hutan (50%), pencemaran udara (46%), sungai yang tercemar (45%) dan banjir (40%). Walaupun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di Provinsi Riau, ternyata 52% responden menganggap bahwa upaya yang pemerintah lakukan terbilang biasa saja. Ditambah lagi, 57% responden menyatakan hal yang sama untuk kebijakan yang sudah pemerintah keluarkan.

Mengingat pentingnya peran anak muda dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, ternyata dari 297 responden anak muda, baru 12% atau 35 responden anak

muda yang pernah terlibat dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Namun demikian, 80% atau 400 orang responden anak muda menyatakan bahwa diri mereka pernah memberikan pendapat/aspirasinya kepada pemerintah di isu lingkungan dan dari 35 orang responden yang menjawab pertanyaan terkait dampak dari aspirasi/pendapat mereka, 51% merasa bahwa pendapat/aspirasi yang mereka berikan berdampak pada kebijakan lingkungan yang sedang dibentuk. Media yang paling banyak digunakan oleh responden untuk menyuarakan aspirasi/pendapat mereka adalah *facebook* (46%) dan *instagram* (35%).

Di sisi lain, walaupun partisipasi responden anak muda rendah dalam membentuk kebijakan lingkungan, tercatat dari 302 orang responden yang menjawab pertanyaan terkait tingkat harapan anak muda terhadap pilkada 2020, 235 orang responden (78%) menyatakan bahwa mereka percaya bahwa pelaksanaan pilkada 2020 memberikan ruang bagi anak muda untuk mengeluarkan pendapat/aspirasi terkait isu lingkungan kepada calon kepala daerah dan pembuat kebijakan.

BAB 01

PENDAHULUAN

BAB 1
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Riau adalah salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatra dan memiliki beragam sumber daya alam di berbagai sektor. Perkebunan, pulp and paper, konsesi hutan, sampai dengan pertambangan serta energi menjadi sektor-sektor utama penopang perekonomian di Provinsi Riau. Provinsi Riau memiliki luas wilayah sebesar 8.984.823,67 Ha. Sebesar 5.406.992,00 Ha atau sekitar 60,18% dari total seluruh luas wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan hutan di Provinsi Riau, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau.¹

Secara umum, pemanfaatan hutan di Provinsi Riau dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi di atas hutan-hutan produksi. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengembangan ekonomi semata menyisakan berbagai permasalahan di bidang lingkungan. Dalam konteks pemanfaatan hutan, Provinsi Riau menghadapi permasalahan lingkungan berupa besarnya angka deforestasi dan degradasi hutan termasuk lahan gambut, yang secara masif berkaitan erat dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tak hanya itu, Provinsi Riau juga dihadapkan pada berbagai kerusakan lingkungan pada sektor lainnya akibat eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan. Banjir, pencemaran air sungai, pencemaran udara dan kabut asap adalah beberapa contoh permasalahan lingkungan di Riau yang tak kunjung usai.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, salah satu masalah lingkungan yang terjadi di Provinsi Riau adalah deforestasi. Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat bahwa seluas 2.339.578,00 Ha atau sekitar 43,27% hutan di Riau merupakan Hutan Produksi Tetap. Selanjutnya secara berturut-turut, areal seluas 1.017.318,00 Ha atau sekitar 18,81% dan areal seluas 1.185.433,00 Ha atau sekitar 21,92% hutan di Provinsi Riau menyandang status sebagai Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK).² Dengan demikian jika dihitung secara keseluruhan, terdapat setidaknya areal seluas 4.542.329,00 Ha hutan yang masuk ke dalam kategori hutan produksi. Artinya, terhadap luas seluruh hutan di Provinsi Riau, terdapat sekitar 84% area hutan yang dimanfaatkan sebagai hutan produksi. Jika dibandingkan dengan luas Provinsi Riau secara umum, maka persentase luas hutan untuk kegiatan produksi adalah sebesar 50,56%. Dengan kata lain, lebih dari setengah wilayah Provinsi Riau merupakan hutan produksi. Pemanfaatan hutan yang terlampau berlebihan membuat jumlah Kawasan Hutan di Riau menjadi berkurang.

1 Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024

2 Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024

BAB 1

PENDAHULUAN

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri dan perkebunan tersebut juga menyalurkan lahan Gambut di Riau. Sekitar 2,2 juta Ha atau sekitar 44% Kesatuan Hidrologi Gambut telah dibebani izin. Izin yang membebani fungsi lindung ekosistem gambut adalah sebesar 1.252.291,31 Ha dan izin yang membebani fungsi budidaya adalah sebesar 949.688,47 Ha.³

Dari penjelasan diatas, Yayasan Partisipasi Muda ingin melihat bagaimana Provinsi Riau juga menghadapi sebuah masalah lingkungan lainnya, yakni pencemaran Sungai. Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan satu diantara banyak permasalahan lingkungan yang mengkhawatirkan di Riau.⁴ Provinsi Riau memiliki setidaknya 15 sungai, dan 4 diantaranya merupakan sungai utama, yaitu Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri. Sungai-sungai tersebut menjadi sumber pengairan bagi masyarakat Riau. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KLL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), diketahui bahwa tingkat pencemaran lingkungan, khususnya sungai di Riau cukup tinggi.⁵ Diantara keempat sungai tersebut, Sungai Siak menjadi alur sungai yang paling rentan tercemar. Hal tersebut dikarenakan, Sungai Siak menjadi jalur utama yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan Selat Malaka, sehingga banyak kapal yang hilir mudik melalui rute tersebut.⁶

Pencemaran Sungai di Provinsi Riau terjadi akibat beberapa faktor, salah satunya adalah pembuangan limbah dari wilayah-wilayah di Riau. Limbah yang mencemari sungai-sungai di Riau terdiri dari berbagai macam limbah, yakni limbah industri yang berasal dari perusahaan dan pabrik, limbah hasil pertanian sampai dengan limbah rumah tangga yang terkumpul dalam skala besar. Limbah-limbah yang tidak dikelola dan diolah secara tepat tersebut dibuang ke bagian hulu sungai hingga terbawa ke hilir, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan limbah yang mencemari kualitas air sungai di DAS sungai. Meskipun merupakan isu strategis yang memerlukan penanganan cepat, pencemaran DAS tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Kerusakan lingkungan di Provinsi Riau membawa berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Pertama, deforestasi dan konversi hutan yang mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan di Riau telah berhasil menyeret Riau sebagai salah satu provinsi dengan luas kebakaran hutan terbesar di Indonesia. Dalam kurun waktu 5 tahun, terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun

³ Rahmad Rahin, 2019, "RPJMD Hijau 2019-2024", <https://www.goriau.com/berita/baca/rpjmd-hijau-20192024.html>, diakses pada 8 Maret 2021

⁴ Febri Kurnia, 2019, "Peran Masyarakat Dibutuhkan Redam Pencemaran DAS di Riau", <https://www.gatra.com/detail/news/449891/ke-bencanaan/peran-masyarakat-dibutuhkan-redam-pencemaran-das-di-riau>, diakses pada 29 Februari 2021

⁵ Tongkulem Siregar, 2019, "Tingkat Pencemaran Sungai di Riau Tinggi" <https://rri.co.id/pekanbaru/daerah/750106/tingkat-pencemaran-sungai-di-riau-tinggi>, diakses pada 29 Februari 2021

⁶ Ibid.

BAB 1 PENDAHULUAN

2020, terdapat sekitar 419.122,46 Ha hutan yang terbakar.⁷ Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ini tidak saja membawa dampak buruk pada aspek kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak buruk pada aspek kesehatan. Pada fenomena karhutla September 2019, terjadi peningkatan secara pesat penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah-wilayah yang mengalami karhutla, termasuk Provinsi Riau. Setidaknya, terdapat 275.793 masyarakat Riau yang menderita ISPA akibat karhutla yang terjadi.⁸ Asap akibat karhutla yang masih menyebar dan belum dapat ditangani terbukti berhasil melumpuhkan kegiatan pendidikan, layanan dasar, ekonomi termasuk jual-beli.

Pada kasus pencemaran DAS, kerugian masyarakat Riau juga perlu dijadikan perhatian khusus. Sungai-sungai di Provinsi Riau perlu dipandang sebagai bagian dari kearifan lokal yang telah menjadi sumber air utama bagi masyarakat dalam beraktivitas. Air sungai yang telah tercemar oleh limbah-limbah dari berbagai sumber, tentunya sangat berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Lebih dari itu, kondisi sungai yang tercemar juga berpengaruh pada rusaknya ekosistem dan biota pada sungai itu sendiri. Dampak yang lebih panjang dari pencemaran sungai adalah menurunnya perekonomian masyarakat yang menggantungkan diri pada sungai-sungai di wilayah Riau.

Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lingkungan di Riau, diperlukan keterlibatan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Pemerintah Daerah kota/kabupaten di dalam Provinsi Riau, korporasi dan pelaku usaha, serta masyarakat sipil, termasuk Anak Muda. Keterlibatan Anak Muda menjadi penting karena sebagai calon penerus generasi bangsa, Anak Muda harus sudah mulai dibiasakan untuk terlibat pada diskursus-diskursus mengenai permasalahan publik. Berdasarkan data BPS Provinsi Riau pada tahun 2019, terdapat 2.402.926 Anak Muda di Provinsi Riau dengan rentang usia antara 15-34 tahun. Besarnya jumlah Anak Muda di Riau menunjukkan bahwa terdapat potensi sumber daya manusia yang besar dalam rangka menuntaskan permasalahan lingkungan di Riau.⁹

⁷ Hasil pengolahan data dari artikel berjudul "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020", http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran, diakses pada 2 Maret 2021

⁸ Silvia Triyanti Luis, 2019, "Jumlah Penderita ISPA Akibat Karhutla Capai 919.516 Orang di Bulan September", <https://nationalgeographic.grid.id/read/131864595/jumlah-penderita-ispa-akibat-karhutla-capai-919516-orang-di-bulan-september?page=all>, diakses pada 2 Maret 2021

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2020, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2019" <https://riau.bps.go.id/dynamictable/2020/03/19/88/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-riau-2011--2019.html>, diakses pada 3 Maret 2021

BAB 1

PENDAHULUAN

“

Dalam laporan yang berjudul “**Pemetaan Masalah Lingkungan dan Partisipasi Politik Anak Muda di Daerah Provinsi Riau**” ini, Generasi Melek Politik akan menyoroti masalah lingkungan yang terjadi di Provinsi Riau beserta kebijakan yang pemerintah daerah susun dan terapkan dalam rangka menyelesaikan masalah lingkungan yang ada. Tentu saja, Generasi Melek Politik juga akan fokus pada keterlibatan Anak Muda dalam pembuatan kebijakan lingkungan di Provinsi Riau. Harapan Generasi Melek Politik, laporan ini dapat membuka mata pemangku kepentingan untuk konsisten dalam melibatkan Anak Muda pada proses penuntasan masalah lingkungan yang terjadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Laporan ini dibuat melalui pendekatan kombinasi, yaitu menggabungkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dalam proses pengumpulan data, Generasi Melek Politik tidak hanya melakukan desk research untuk memperoleh data-data sekunder, namun juga melaksanakan *focus group discussion* dan juga survei terhadap Anak Muda di Provinsi Riau. Selanjutnya, data tersebut kami analisis untuk kemudian kami sandingkan bersama dengan kebijakan lingkungan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menyelesaikan masalah lingkungan yang terdapat di wilayah tersebut.

BAB 1 PENDAHULUAN

TABEL 1.1 PERSEBARAN DEMOGRAFI RESPONDEN

Jenis Kelamin	Komposisi
Perempuan	59%
Laki-Laki	41%
Umur	Komposisi
17-20	52,7%
21-25	32,3%
26-30	14,4%
31-35	0,6%
Latar Belakang Pendidikan	Komposisi
S2	1%
S1	24%
SMA/SMK	71%
SMP	3%
SD	0%
Bidang Pekerjaan	Komposisi
Mahasiswa/Pelajar	66,3%
Pekerja Swasta	11,6%
Freelancer	7,6%
Wiraswasta	5,2%
Pengajar (Dosen/Guru)	4,0%
Ibu Rumah Tangga	3,6%
ASN (PNS, BUMN, BUMD, dll)	1,1%
Pegawai	0,6%

Metode kuantitatif juga digunakan dalam survei ini dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* (tidak acak).¹⁰ Kualifikasi responden dalam survei ini adalah Anak Muda dengan rentang usia 17-35 tahun. Berdasarkan hasil survei, terdapat 632 orang responden yang berpartisipasi, dengan perbandingan 371 orang responden perempuan dan 261 orang responden laki-laki. Responden yang tersasar dalam survei ini adalah Anak

¹⁰ Teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu

BAB 1

PENDAHULUAN

Muda yang memiliki akses pada internet dan aktif sebagai pengguna media sosial.

Jumlah responden pada tiap pertanyaan dalam penelitian ini semakin berkurang seiring dengan jawaban responden. Pada awal survei terdapat 632 responden yang menjawab pertanyaan, namun demikian terdapat pengurangan responden survei pada pertanyaan di diagram 2.1 dan 2.2 menjadi 302. Hal yang sama terjadi pada diagram 3.1 dan 3.2, yang mana hanya 302 dan 296 responden yang memberikan jawaban atas pertanyaan survei. Namun demikian, terjadi kenaikan jumlah responden yang mengisi survei mulai dari diagram 3.3, sebesar 501 responden. Pada grafik 3.1 hanya diambil jawaban dari 400 responden yang menjawab pernah pada diagram 3.3 dikurangi dengan 4 orang tidak melanjutkan survey, sehingga total responden yang mengisi survei menjadi 396 orang.

Survei ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan, kepedulian serta partisipasi kaum milenial di Provinsi Riau terhadap politik dan kebijakan publik di Provinsi Riau, khususnya terkait isu-isu di sektor lingkungan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam survei terbagi dalam beberapa bagian yaitu pertanyaan pilihan ganda (*close-ended*), pertanyaan isian singkat (*short and open-ended*), dan pertanyaan berskala. Survei ini bersifat *non-representative* yang berarti tidak mencerminkan pandangan seluruh Anak Muda yang terdapat di Provinsi Riau. Oleh karena itu, penggunaan istilah “Anak Muda” di dalam laporan ini hanya merujuk pada anak muda di Provinsi Riau yang menjadi responden pada survei ini. ***Focus group discussion* dan survei ini dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan besar “Bagaimana pengetahuan serta kepedulian kaum milenial di Provinsi Riau terhadap isu lingkungan?” serta “Bagaimana tingkat partisipasi politik mereka dalam isu lingkungan?”**

BAB 02

PEMBAHASAN

BAB 2 PEMBAHASAN

1. PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU

Generasi Melek Politik menemukan bahwa masalah lingkungan di Provinsi Riau merupakan masalah yang kompleks dan mengakar kuat. Kompleksitas permasalahan tidak hanya terletak pada jenis-jenis isu lingkungan hidup yang terjadi, namun juga menyangkut aktor-aktor yang terlibat dalam proses perusakan lingkungan yang menyeret korporasi besar, tokoh politik sampai dengan pemimpin-pemimpin bangsa. Permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Riau telah sampai pada titik yang kritis dan mengkhawatirkan karena telah menimbulkan berbagai dampak negatif. Fenomena karhutla yang rutin terjadi di Provinsi Riau menandakan bahwa kegiatan deforestasi dan konversi hutan telah terjadi terlambat masif dan membahayakan. Terhitung sejak awal tahun 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021 saja, telah terjadi kebakaran terhadap setidaknya 657,71 Ha hutan yang tersebar di delapan daerah di Riau.¹¹ Lokasi kebakaran hutan dan lahan terjadi di beberapa titik yakni 200,66 Ha di Bengkalis; 122,5 Ha di Indragiri Hilir; 109,1 Ha di Dumai; 72,9 Ha di Siak; 48 Ha di Pelalawan; 35,5 Ha di Meranti, 31 Ha di Rokan Hilir, 25 Ha di Indragiri Hulu dan 3 Ha di Pekanbaru.¹² Berdasarkan situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sampai dengan 31 Oktober 2021.

Selain kebakaran hutan dan lahan, Provinsi Riau juga merupakan wilayah yang mengalami bencana banjir secara rutin hampir setiap tahun. Salah satu fenomena banjir terbesar di Riau terjadi di tahun 2019. Terdapat setidaknya 6 wilayah yang terendam banjir pada akhir tahun 2019.¹³ Keenam wilayah tersebut masing-masing adalah Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Rokan Hilir. Sebanyak 62.630 jiwa dan 25.133 kepala keluarga (KK) menjadi korban dalam bencana banjir yang terjadi di Provinsi Riau pada tahun 2019 tersebut. Bahkan, Pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor dikarenakan tingginya curah hujan. Meski demikian, para pakar dan aktivis lingkungan hidup menyampaikan bahwa bukan curah hujan yang menjadi penyebab utama banjir di Provinsi Riau. Perusakan hutan alam di kawasan hutan oleh korporasi sawit dan hutan tanaman industri (HTI), serta keberadaan cukong-cukong yang menebang hutan secara sembarangan dan merusak gambut disinyalir merupakan faktor utama terjadinya banjir di Provinsi Riau.¹⁴ Deforestasi yang masif serta pembakaran hutan dan lahan di Kawasan gambut berdampak pada menipisnya jumlah zona lindung untuk resapan air, sehingga tanah kesulitan untuk meresap jumlah air hujan yang

11 FB Anggoro, 2021, "Lahan gambut Rimbo Panjang-Riau Terbakar, Tim Berjibaku Memadamkan", <https://www.antaranews.com/berita/2034302/lahan-gambut-rimbo-panjang-riau-terbakar-tim-berjibaku-memadamkan#mobile-nav>, diakses pada 10 Maret 2021

12 Ibid.

13 Idon Tanjung, 2019, "Sebanyak 62.630 Jiwa di 6 Kabupaten Terdampak Banjir di Riau Sejak Pertengahan November", <https://regional.kompas.com/read/2019/12/20/21292801/sebanyak-62630-jiwa-di-6-kabupaten-terdampak-banjir-di-riau-sejak?page=all>, diakses pada 1 Maret 2021

14 Februari Kurnia, 2021, "Industri Ekstraktif Picu Bencana Banjir Tahunan di Riau", <https://www.gatra.com/detail/news/502204/kebencanaan/industri-ekstraktif-picu-bencana-banjir-tahunan-di-riau#:~:text=%22Perusakan%20hutan%20alam%20di%20kawasan,di%20Riau%2C%22%20jelas%20Okto.,> diakses pada 5 Maret 2021

BAB 2 PEMBAHASAN

turun, terlebih dalam skala yang besar.¹⁵ Pendangkalan sungai akibat erosi juga menjadi faktor lain terjadinya banjir di Riau.¹⁶ Sungai yang dangkal kehilangan kemampuannya untuk menyerap air hujan, sehingga apabila curah hujan tinggi, maka sungai menjadi meluap dan menenggelamkan wilayah sekitar. Limbah dan sampah yang dibuang secara sembarangan dan berlebihan di bantaran sungai juga berperan dalam menyumbat aliran air sungai.

Riau telah menjadi langganan sebagai provinsi dengan angka deforestasi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Buku Deforestasi Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, terjadi peningkatan angka deforestasi neto hutan di Provinsi Riau dari 43.714,8 Ha pada tahun 2017¹⁷ menjadi 142.011,1 Ha pada tahun 2018.¹⁸ Data lain menunjukkan bahwa sisa hutan di Provinsi Riau pada tahun 2020 hanya sebesar 1.442.669 Ha, menurun drastis jika dibandingkan dengan luas hutan di Riau pada tahun 1982 yakni sebesar 6.727.546 Ha.¹⁹ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa deforestasi yang terjadi di Riau telah tergolong masif dan signifikan. Apalagi, jika mengingat usaha-usaha berbasis lahan yang menyebabkan konversi hutan -seperti usaha perkebunan kelapa sawit- masih merupakan kegiatan usaha yang utama dan banyak dilakukan di Riau, maka angka deforestasi dan konversi hutan di Provinsi Riau masih akan meningkat tajam selama beberapa waktu ke depan.

Deforestasi yang terjadi secara masif di Riau dikarenakan besarnya angka usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan pulp and paper pada skala raksasa. Korporasi-korporasi perkebunan seolah berkompetisi untuk memperoleh lahan dan izin dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya di Riau. Proses konversi hutan menjadi lahan perkebunan monokultur seperti kelapa sawit selain berperan dalam mengikis jumlah lahan hutan, juga berpotensi besar dalam menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana diketahui, Provinsi Riau adalah salah satu daerah di Indonesia yang paling sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Pelaku usaha, baik korporasi maupun masyarakat memiliki kecenderungan untuk membakar hutan sebagai bagian dari kegiatan pembukaan hutan. Alasan efisiensi biaya menjadi faktor utama bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit di Riau dalam melakukan pembakaran hutan. Koordinator Jaringan Pekerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menyatakan bahwa aktor utama dibalik terjadinya deforestasi besar-besaran adalah korporasi-korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI), perusahaan perkebunan sawit serta mafia-mafia kehutanan. Pelbagai masalah seperti korupsi dan penggelapan pajak ikut menambah daftar kelam dunia kehutanan di Provinsi Riau. Pansus DPRD Riau menyampaikan bahwa potensi penerimaan pajak Provinsi Riau yang diperoleh dari sektor perkebunan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Rian Nofitra, 2019, "Banjir Riau Disebut Akibat Hutan Berubah Fungsi dan Rusa", <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2019/12/22/banjir-riau-disebut-akibat-hutan-berubah-fungsi-dan-rusa>, diakses pada 8 Maret 2021

¹⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019, Deforestasi Indonesia Tahun 2017-2018, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Sulthon Hasanuddin. 2020, "Malapetaka Deforestasi Hutan Alam", <https://akurat.co/news/id-1229941-read-malapetaka-deforestasi-hutan-alam-riau>, diakses pada 19 Februari 2021

BAB 2 PEMBAHASAN

sawit seharusnya bisa mencapai 24 triliun rupiah. Akan tetapi, pemprov Riau hanya menerima 9 triliun rupiah secara faktual.²⁰

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa deforestasi dan konversi hutan secara masif adalah salah satu penyebab terjadinya banjir tahunan di Provinsi Riau. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh pembuangan sampah dan limbah ke dalam sungai. Alih-alih melakukan pengelolaan dan pengolahan limbah secara tepat, pabrik dan pelaku usaha di Riau justru cenderung melakukan pembuangan residu kegiatan usahanya di sungai. Akibatnya, selain banjir, kualitas sumber daya air di Daerah Aliran Sungai (DAS) bagian hilir tercemar berat oleh berbagai zat-zat kimia dan beracun, sehingga tidak dapat diperuntukan bagi kegiatan sehari-hari.

Kualitas air sungai-sungai di Riau terancam tercemar dan beracun. Sungai Kampar dinyatakan mengalami pencemaran berat berdasarkan hasil evaluasi selama empat tahun, semenjak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Air Sungai Kampar dinilai mengalami penurunan kualitas dikarenakan oleh limbah sisa aktivitas domestik, industri, peternakan, perkebunan, pertanian, hutan tanaman industri, perikanan dan pertambangan. Catatan kritis mengenai situasi ini adalah tidak dilaksanakannya evaluasi terhadap izin pembuangan limbah.²¹ Serupa tapi tak sama, air di sungai Siak juga sudah tercemar berat. Salah satu fenomena langsung akibat tercemarnya air Sungai Siak adalah banyaknya ikan-ikan yang mati mendadak serta keluarnya aroma busuk dari air Sungai Siak. Pada tahun 2018, warga Siak juga melaporkan adanya perubahan warna air di Sungai Siak menjadi hitam. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyinyalir bahwa salah satu perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Siak telah melakukan pembuangan limbah residu produksi ke Sungai Siak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.²² Setali tiga uang dengan Sungai Kampar dan Sungai Siak, Sungai Bungin dan Sungai Dusun Tuo serta sungai-sungai lainnya di wilayah Riau juga menghadapi situasi yang serupa. Korporasi-korporasi besar melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai-sungai tersebut tanpa menerapkan manajemen pengelolaan limbah yang mumpuni.²³

Meskipun menghadapi berbagai masalah yang kompleks, Pemerintah Daerah Riau termasuk Pemerintah Daerah di level kota dan kabupaten di wilayah Riau, telah melakukan beragam upaya untuk meminimalisasi dampak kerusakan lingkungan. Salah satu contohnya adalah, program Siak Hijau yang dibentuk dan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Siak dalam rangka mengatasi persoalan deforestasi yang masif. Meginisiasi Program Siak Hijau pada tahun

20 Ibid.

21 Suryadi, 2019, "Sungai Kampar Tercemar, Adakah Upaya Pemulihan?", <https://www.mongabay.co.id/2019/03/22/sungai-kampar-tercemar-adakah-upaya-pemulihan/>, diakses pada 7 Maret 2021

22 Suryadi, 2019, "Pabrik Sawit Cemari Sungai di Siak, Bagaimana Penanganannya?", <https://www.mongabay.co.id/2019/01/22/pabrik-sawit-cemari-sungai-di-siak-bagaimana-penanganannya/>, diakses pada 21 Februari 2021

23 Febru Kurnia, 2020, "Perusahaan Sawit di Riau Diduga Buang Limbah ke Sungai", <https://www.gatra.com/detail/news/485910/kebenaran/perusahaan-sawit-di-riau-diduga-buang-limbah-ke-sungai>pada 7 Maret 2021

BAB 2 PEMBAHASAN

2016 pasca insiden kebakaran hutan dan lahan besar-besaran yang melanda Kabupaten Siak di tahun 2015. Untuk mengoptimalkan jalannya program Siak Hijau, Pemerintah Kabupaten Siak menggandeng berbagai pihak untuk terlibat aktif, yakni *civil society organization* dalam hal ini Saudagho Siak, pihak swasta, serta mitra pembangunan yang memberikan bantuan pendanaan, dalam hal ini CDP.²⁴ Contoh kebijakan di tingkat provinsi adalah pelaksanaan program Riau Hijau yang diinisiasi oleh Gubernur Syamsuar yang terinspirasi dari program Siak Hijau. Meskipun merupakan niat yang baik, nyatanya program Riau Hijau belum berjalan mulus dan efektif. Pasalnya, dalam lingkup provinsi, permasalahan lingkungan yang dihadapi tentunya lebih kompleks dan beragam. Oleh karena itu, program Riau Hijau harus dievaluasi dan ditinjau ulang. Harapannya, Riau Hijau bukan hanya menjadi kegiatan reboisasi semata, melainkan juga fokus pada isu-isu lingkungan lainnya seperti pengelolaan sampah, kampanye hemat energi, pencegahan pencemaran sungai, hingga konflik satwa dengan manusia.²⁵

Persoalan lingkungan yang terjadi di Riau dipahami oleh komunitas muda. Berdasarkan hasil survei terhadap 632 Anak Muda, 98% responden menyatakan bahwa mereka mengetahui persoalan lingkungan di Riau. Pemahaman komunitas muda di Riau tidak terlepas dari pentingnya isu lingkungan bagi Anak Muda usia produktif. Sebanyak 65% responden berpendapat bahwa isu lingkungan merupakan hal yang sangat penting bagi mereka dan sebanyak 24% responden menganggap isu lingkungan adalah hal yang penting. Meski demikian, terdapat 8% responden yang merasa isu lingkungan merupakan isu yang sangat tidak penting.

Seberapa Penting Isu Lingkungan Bagi Anda? (N=643)

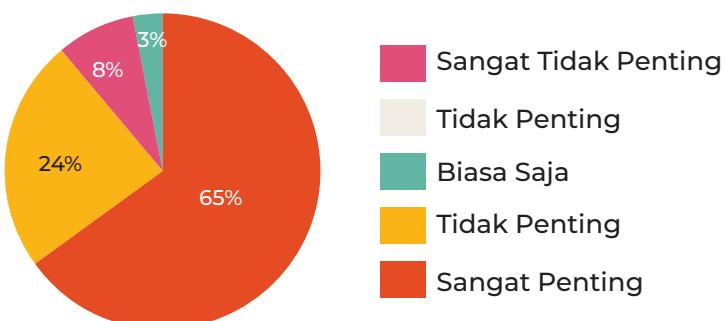


DIAGRAM 1.1: MINAT ANAK MUDA DI RIAU TERHADAP ISU LINGKUNGAN.

Dari 622 responden anak muda yang mengetahui permasalahan lingkungan di Provinsi Riau, sampah yang menumpuk menjadi masalah yang paling

24 Kabupaten Lestari, 2019, "Kabupaten Hijau, Kolaborasi Kabupaten Siak Cegah Karhutla", <https://kabupatenlestari.org/berita/read/kabupaten-hijau-kolaborasi-kabupaten-siak-cegah-karhutla>, diakses pada 20 Februari 2021

25 Febru Kurnia, 2021, "Pengamat: Program Riau Hijau Perlu Ditinjau Ulang", <https://www.gatra.com/detail/news/500570/kebencanaan/pengamat-program-riau-hijau-perlu-ditinjau-ulang>, diakses pada 10 Maret 2021

BAB 2 PEMBAHASAN

banyak dipilih oleh para responden (69%). Disusul oleh kerusakan hutan (50%), pencemaran udara (46%), sungai yang tercemar (45%), banjir (40%) dan pencemaran air (31%). Permasalahan tersebut sesuai dengan hasil Focus Group Discussion, bahwa Komunitas Muda di Riau menempatkan permasalahan kebakaran hutan, kerusakan lahan gambut, pencemaran sungai, pengelolaan sampah dan pencemaran udara sebagai masalah utama.²⁶

**Masalah Lingkungan Apa yang Menurut Anda Terjadi di Daerah Anda?
(N: 622)**



GRAFIK 1.1: JENIS-JENIS MASALAH LINGKUNGAN YANG TERJADI DI PROVINSI RIAU DALAM PANDANGAN ANAK MUDA.

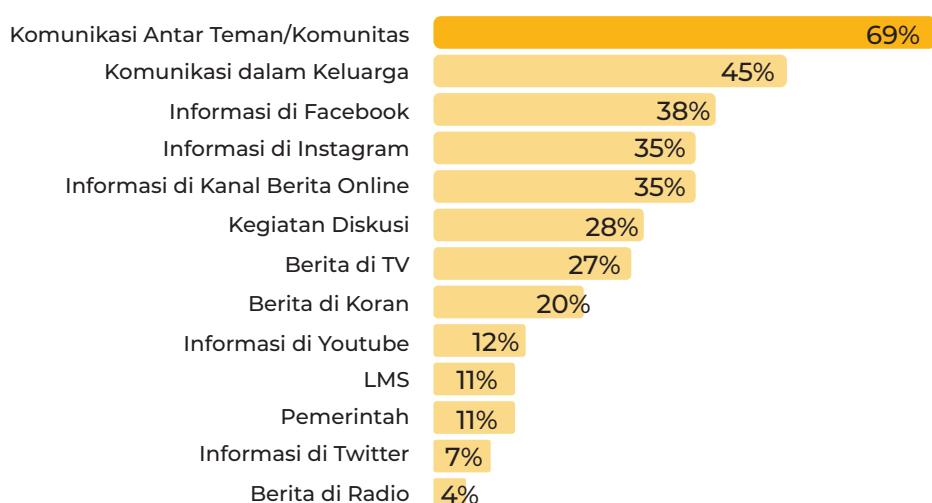
Selama ini komunitas muda Riau memanfaatkan berbagai medium dan sumber dalam rangka menggali informasi dan memperdalam pemahaman terkait persoalan lingkungan di Riau. Dalam sajian grafik 1.2 di bawah, dapat dilihat bahwa komunikasi secara informal antar teman atau komunitas merupakan cara yang paling banyak digunakan (69%) oleh Anak Muda dalam mengakses informasi terkait isu-isu lingkungan. Selanjutnya, komunikasi dalam keluarga (45%) ternyata juga terbukti mampu meningkatkan pemahaman Anak Muda mengenai permasalahan lingkungan di Riau. Secara berturut-turut, informasi yang berasal dari facebook (38%) dan Instagram (35%) terbukti cukup ampuh dalam memberikan informasi dan edukasi seputar isu lingkungan terhadap Anak Muda di Riau. Informasi yang diperoleh dari sumber kanal berita online (35%) juga memiliki efektivitas yang sama seperti informasi dari Instagram dalam memberikan pemahaman bagi Anak Muda seputar isu lingkungan di Riau. Perkembangan teknologi yang pesat juga berpengaruh pada menurunnya popularitas televisi (27%), koran (20%) dan radio (4%) sebagai sumber rujukan utama bagi Anak Muda dalam mengakses informasi terkait permasalahan lingkungan hidup di Riau. Meskipun memasuki era sosial media, ternyata

²⁶ Focus Group Discussion, "Permasalahan Lingkungan dan Partisipasi Politik Anak Muda di Kabupaten Siak", dengan melibatkan 13 Organisasi Masyarakat Sipil di sektor lingkungan maupun komunitas Anak Muda di Kabupaten Siak, pada 23 Oktober 2021, 2 November 2021 dan 16 November 2021

BAB 2 PEMBAHASAN

twitter (7%) dan youtube (12%) tidak seefektif facebook dan instagram dalam mengajak Anak Muda. Terakhir, Anak Muda di Provinsi Riau juga memperoleh akses informasi seputar isu-isu lingkungan dari berbagai kegiatan diskusi (28%), maupun secara resmi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (11%) dan Pemerintah (11%).

Dari Mana Anda Memperoleh Informasi Mengenai Permasalahan Lingkungan yang Terjadi di Daerah Anda? (N: 622)



GRAFIK 1.2: SUMBER INFORMASI PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU BAGI ANAK MUDA

Menurut anda apa penyebab utama masalah lingkungan yang terjadi di daerah anda? (N:622)



GRAFIK 1.3: PENYEBAB PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU

Komunitas muda di Riau memahami bahwa permasalahan lingkungan di Riau terjadi karena berbagai faktor. Minimnya kebijakan pemerintah yang pro pada pelestarian lingkungan (47%), munculnya kepentingan pihak-pihak tertentu yang melakukan eksplorasi lingkungan secara koruptif (49%), serta ketidasesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsinya (43%) dianggap oleh komunitas muda

BAB 2 PEMBAHASAN

sebagai faktor-faktor yang memengaruhi munculnya berbagai permasalahan lingkungan di Riau. Meski demikian, komunitas muda juga mencatat bahwa peraturan di sektor lingkungan yang tidak terimplementasikan sebagaimana mestinya (59%) serta rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan (75%) juga sangat berperan dalam berbagai masalah lingkungan yang terjadi.

Apakah Anda Terdampak dari Permasalahan Lingkungan yang Terjadi di Daerah Anda? (N: 622)

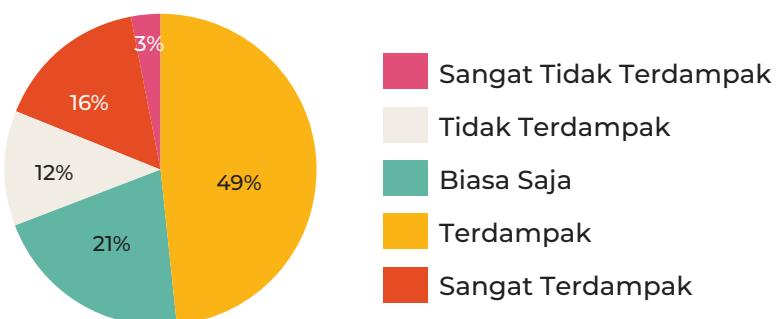
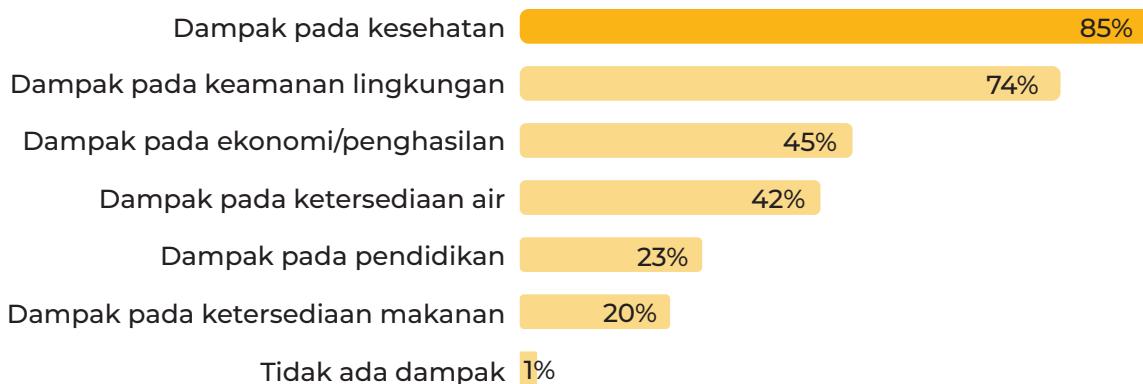


DIAGRAM 1.2: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA TERHADAP DAMPAK PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU

Persoalan lingkungan menjadi perhatian komunitas muda karena sebagian besar khawatir dengan dampak yang mungkin telah atau akan mengancam mereka baik saat ini maupun di masa yang akan datang (65%). Hanya sebagian kecil Anak Muda di Riau yang merasa bahwa permasalahan lingkungan yang terjadi di Riau tidak akan berdampak pada mereka (15%). Pemerintah dipandang belum mampu memberikan rasa aman terhadap risiko lingkungan yang terjadi. Berbagai risiko dan dampak atas permasalahan lingkungan dirasakan oleh Anak Muda di Riau. Dampak yang paling dirasakan secara signifikan sekaligus paling dikhawatirkan oleh Anak Muda adalah dampak terhadap kesehatan (85%). Selain itu, dampak terhadap keamanan lingkungan (74%) juga menjadi perhatian dari Anak Muda di Riau. Dampak lainnya yang turut dirasakan adalah dampak secara ekonomi/penghasilan (45%), dampak pada ketersediaan air (42%), dampak pada pendidikan (23%), serta dampak pada ketersediaan makanan (20%). Berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di Riau jika tidak mendapatkan penanganan yang baik, lambat laun akan memperparah dampak-dampak yang dirasakan oleh masyarakat, termasuk Anak Muda.

BAB 2 PEMBAHASAN

Apakah Dampak yang terjadi akibat Permasalahan Lingkungan di Daerah Anda?(N: 622)



GRAFIK 1.4: DAMPAK MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU

2. PERAN PEMERINTAH DALAM MENUNTASKAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, beragam upaya dan intervensi telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah Provinsi Riau, dalam rangka menuntaskan pelbagai permasalahan di sektor lingkungan. Pemerintah Daerah Provinsi Riau di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 mengisyaratkan bahwa pelestarian lingkungan hidup adalah salah satu prioritas dalam pembangunan daerah. Komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Riau tersebut tercermin dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang menegaskan beberapa arah kebijakan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah.²⁷

Menurut anda, bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan di daerah anda? (N=643)

No	Sasaran	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup
		Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana
		Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan

²⁷ Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024

BAB 2 PEMBAHASAN

		Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS
2.	Menurunkan emisi gas rumah kaca	Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau
		Memulihkan Kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi

TABEL 2.1: ARAH KEBIJAKAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DALAM RPJMD RIAU 2019-2024

Berdasarkan arah kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Riau memahami berbagai permasalahan lingkungan yang ada di Riau dan mengupayakan penanganan yang serius melalui berbagai pendekatan. Pemerintah Provinsi Riau juga mengadopsi konsep pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Konsep ini diimplementasikan melalui penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi dan area penggunaan lain sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 5 Tahun 2019 Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.²⁸

Selain itu, Pemerintah Daerah Provinsi Riau juga akan menjadi provinsi percontohan Rendah Karbon melalui Nota Kesepahaman Bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS). Untuk menjalankan misi itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh Provinsi Riau seperti melaksanakan rehabilitasi dan reboisasi lahan melalui program Riau Hijau, melaksanakan pengawasan Kawasan hutan, meningkatkan edukasi terhadap masyarakat terkait pembukaan lahan tanpa pembakaran, mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan, memanfaatkan lahan gambut untuk ketahanan pangan dan tanaman ramah lingkungan, serta menggunakan biomasa sebagai sumber energi dan pengelolaan sampah.²⁹

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) merilis laporan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) setiap tahun. Indeks disusun dalam rangka menyamakan persepsi dan sebagai instrumen bersama bagi seluruh pihak dalam memantau dan mengevaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, indeks ini diharapkan dapat menjadi acuan data dalam rangka merencanakan kebijakan di sektor lingkungan, baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Terdapat 3 komponen yang digunakan dalam menghitung IKLH, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).³⁰

28 RiauPos.Co, 2019, "Menteri LHK Tetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2019", <https://riaupos.jawapos.com/advertorial/20/09/2019/209216/menteri-lhk-tetapkan-peta-indikatif-penghentian-pemberian-izin-baru-tahun-2019.html>, diakses pada 8 Maret 2021

29 Dwi Nicken Tari, 2020, "Teken MoU dengan Bappenas, Riau Jadi Provinsi Percontohan Rendah Karbon", meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, diakses pada 9 Maret 2021

30 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia, 2018.

BAB 2 PEMBAHASAN

Indikator	TAHUN			
	2016	2017	2018	2019
Indeks Kualitas Air (IKA)	50,75	65,23	73,68	53,55
Indeks Kualitas Udara (IKU)	72,40	90,90	89,91	90,4
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	49,45	54,51	48,37	48,15
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,73	68,64	68,43	62,47

TABEL 2.2: NILAI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI RIAU 2016-2019³¹³²³³³⁴

Berdasarkan sajian data di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, kualitas lingkungan hidup di Riau mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2017 di seluruh aspek, yakni kualitas air, kualitas udara serta kualitas tutupan lahan. Meski demikian, pada tahun 2018 dan 2019 prestasi tersebut tidak dapat dipertahankan, karena terbukti telah terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup. Hal ini membuktikan bahwa kinerja pemerintah dalam sektor lingkungan hidup masih belum konsisten setiap waktunya sehingga menyebabkan kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan masih naik dan turun.

Dengan demikian, komitmen pemerintah dalam penuntasan permasalahan lingkungan masih harus dibuktikan melalui berbagai pemenuhan target dan capaian. Berbagai pendekatan yang telah dilakukan tidak mengartikulasikan bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan serta permasalahan lingkungan lainnya di Riau telah usai. Pemerintah Daerah Provinsi Riau masih dibebani oleh berbagai pekerjaan rumah untuk menuntaskan permasalahan deforestasi dan kebakaran hutan. Tidak hanya itu, masalah penanganan limbah dan pencemaran air di sungai-sungai yang juga belum terselesaikan secara baik menambah daftar pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

³¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019", Jakarta

³² Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019, "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2018", Jakarta

³³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2017", Jakarta

³⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017, "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2016", Jakarta

BAB 2 PEMBAHASAN

Menurut anda, bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan masalah lingkungan di daerah anda?

(N:302)

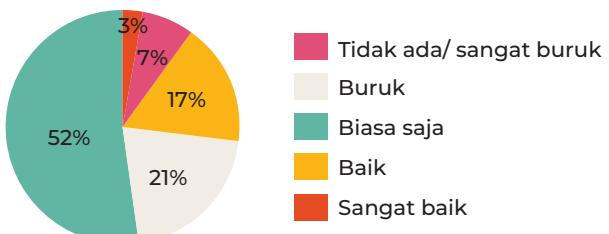


DIAGRAM 2.1: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU.

Meski demikian, responden anak muda memiliki penilaian tersendiri terhadap upaya telah pemerintah daerah lakukan dalam menangani masalah lingkungan di Provinsi Riau. Dari 302 responden anak muda yang memberikan tanggapannya terkait dengan upaya yang pemerintah lakukan dalam menyelesaikan masalah lingkungan, 52% responden menganggap bahwa upaya yang ada terbilang biasa saja. Sebanyak 20% responden lainnya menyatakan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menangani permasalahan lingkungan di Riau telah baik dan sangat baik. Sisanya, sebanyak 28% responden menganggap bahwa upaya pemerintah daerah justru masih buruk dan sangat buruk.

Menurut anda bagaimana kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan lingkungan di daerah anda?

(N:302)

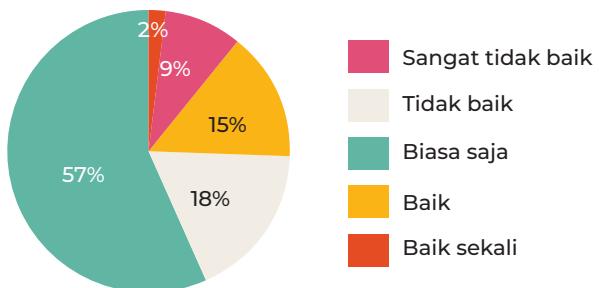


DIAGRAM 2.2: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA TERHADAP KEBERHASILAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI RIAU.

Sementara itu, berkaitan dengan kebijakan sektor lingkungan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah, 57% dari 302 responden menganggap bahwa kebijakan tersebut biasa saja. Selanjutnya, hanya 17% responden yang menganggap bahwa kebijakan yang telah pemerintah gulirkan dalam sektor lingkungan hidup dinilai baik dan sangat baik. Terakhir, sebanyak 27% responden justru menilai bahwa kebijakan yang pemerintah daerah terapkan adalah buruk dan sangat buruk.

BAB 2 PEMBAHASAN

3. PERAN DAN PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU.

Perumusan kebijakan publik terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama adalah perumusan masalah. Tahap kedua adalah setting agenda kebijakan. Tahap ketiga adalah pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Tahapan keempat adalah penetapan kebijakan. Tahapan-tahapan ini memiliki aktor-aktor dalam merumuskan kebijakan, yaitu Lembaga eksekutif, Lembaga legislatif, Lembaga yudikatif, partai politik, kelompok kepentingan dan warga individu.

Faktanya, warga individu seringkali tidak mendapat porsi yang besar dalam tahapan perumusan kebijakan. Penyaluran aspirasi dari masyarakat secara individual seringkali tidak memiliki ruang dalam tahapan perumusan kebijakan. Dalam konsepsi ini, ruang publik tidak diartikan secara fisik tetapi merupakan ruang sosial yang dihasilkan oleh tindakan komunikatif. Ruang publik menjadi tempat bagi terbentuknya opini publik yang merefleksikan isu-isu yang berkembang di masyarakat.

Keterbatasan akses secara individual lah yang kemudian melatarbelakangi terbentuknya berbagai komunitas dan LSM yang bergerak pada advokasi kebijakan lingkungan. Contoh praktik baik keterlibatan anak muda dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di Riau adalah dengan diinisiasinya pembentukan Sedagho di Kabupaten Siak. Sedagho sendiri merupakan konsorsium dari 21 Civil Society Organization yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan secara parsial, seperti isu Daerah Aliran Sungai, isu deforestasi, isu kebakaran hutan dan lahan gambut, isu banjir, isu sampah dan isu-isu lingkungan lainnya. Sedagho sendiri adalah pihak yang mendorong dibentuknya program Siak Hijau. Pendekatan yang dilakukan oleh Sedagho tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan lapangan, akan tetapi juga terlibat dalam proses penyusunan kebijakan di sektor lingkungan.

Jika dikaitkan dengan partisipasi anak muda dalam pembuatan kebijakan dalam menyelesaikan masalah lingkungan di Provinsi Riau, Yayasan Partisipasi Muda melihat bahwa lebih banyak responden survei yang menganggap bahwa anak muda hanya terkadang saja dilibatkan dalam penyusunan kebijakan lingkungan. Dari 302 responden anak muda, 35% diantaranya menyatakan demikian. Sebanyak 36% responden mengaku tidak dilibatkan dan sangat tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan lingkungan. Hanya sebesar 29% responden yang merasa dilibatkan dan sangat dilibatkan oleh pemerintah dalam menyusun kebijakan di sektor lingkungan. Padahal, anak muda sudah seharusnya dilibatkan dalam menyelesaikan masalah lingkungan yang terjadi di daerahnya. Mengingat permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang berdampak langsung pada kualitas hidup anak muda.

BAB 2 PEMBAHASAN

Menurut anda, apakah anak muda cukup dilibatkan dalam pembuatan kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah anda?
(N:302)

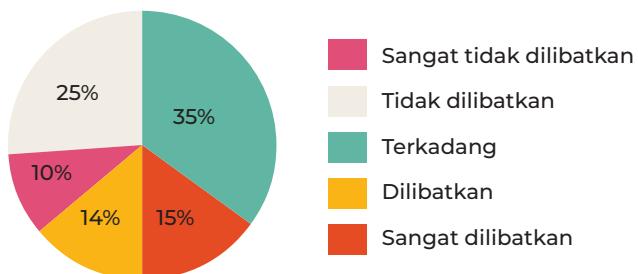


DIAGRAM 3.1: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA PELIBATAN ANAK MUDA DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU.

Apakah anda pernah terlibat dalam menyusun kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di daerah anda?
(N:297)

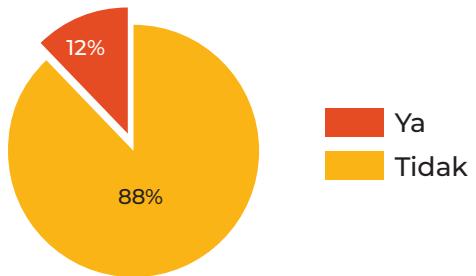


DIAGRAM 3.2: TINGKAT PELIBATAN ANAK MUDA DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI RIAU

Jarangnya keterlibatan komunitas muda dalam proses penyusunan kebijakan lingkungan di Riau sesuai dengan sedikitnya jumlah responden yang pernah dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan lingkungan di Provinsi Riau. Dari sebanyak 297 responden yang memberikan tanggapan, hanya 12% responden yang pernah terlibat dalam proses penyusunan kebijakan, sedangkan sebagian besar responden yakni sejumlah 88% tidak pernah dilibatkan.

Meskipun hanya sedikit Anak Muda yang pernah diajak terlibat dalam proses penyusunan kebijakan lingkungan di Riau, hal tersebut tidak menyurutkan semangat Anak Muda untuk tetap mengambil peran dalam menyuarakan aspirasi mereka berkaitan dengan isu lingkungan kepada pemerintah daerah. Hasil survei menyatakan, bahwa dari sebanyak 501 responden, sekitar 80% diantaranya pernah menyampaikan suara dan aspirasinya mengenai isu lingkungan. Dari 400 responden yang pernah menyampaikan aspirasinya,

BAB 2 PEMBAHASAN

sebanyak 35 responden memberikan tanggapan mengenai pengaruh aspirasi dan suara Anak Muda terhadap proses pengambilan kebijakan dalam rangka mengatasi masalah lingkungan di Riau. Sebanyak 9 dan 18 responden atau sekitar 26% dan 51% responden menyatakan bahwa aspirasi mereka berpengaruh bahkan sangat berpengaruh dalam proses pengambilan kebijakan lingkungan di Riau.

Apakah Anda Pernah Menyampaikan Aspirasi atau Pendapat tentang Persoalan Lingkungan di Daerah Anda Kepada Pemerintah Daerah?(N:501)

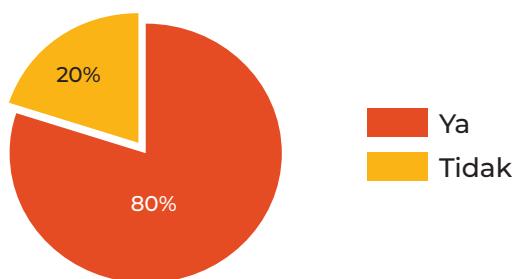


DIAGRAM 3.1: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA PELIBATAN ANAK MUDA DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU.

**Jika pernah, menurut anda apakah aspirasi dan pendapat anak muda berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan untuk mengatasi permasalahan lingkungan di daerah anda?
(N:35)**

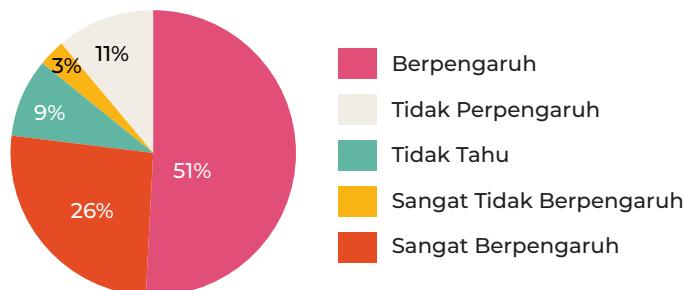


DIAGRAM 3.4: TINGKAT PERSEPSI ANAK MUDA MENGENAI PENGARUH ASPIRASI/PENDAPAT ANAK MUDA TERHADAP PEMBUATAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU.

Selanjutnya, perlu dilihat lebih lanjut seberapa jauh tingkat responsivitas pemerintah daerah terhadap adanya aspirasi/pendapat anak muda terkait isu lingkungan. Survei menunjukkan bahwa dari 400 responden yang memberikan pendapat mereka, sebesar 78% responden menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan tanggapan. Hanya sebesar 21% responden yang mengaku telah memperoleh tanggapan atas aspirasi mereka dan 1% tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut.

BAB 2 PEMBAHASAN

Apakah Pendapat atau Aspirasi Anda Mendapatkan Respon atau Tanggapan dari Pemerintah Daerah?(N: 400)

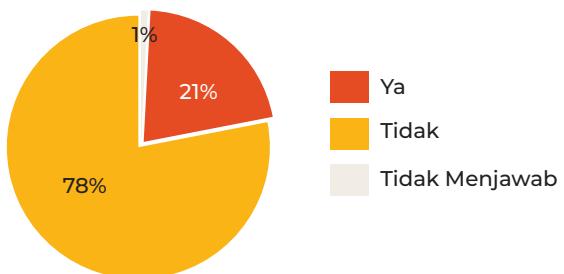
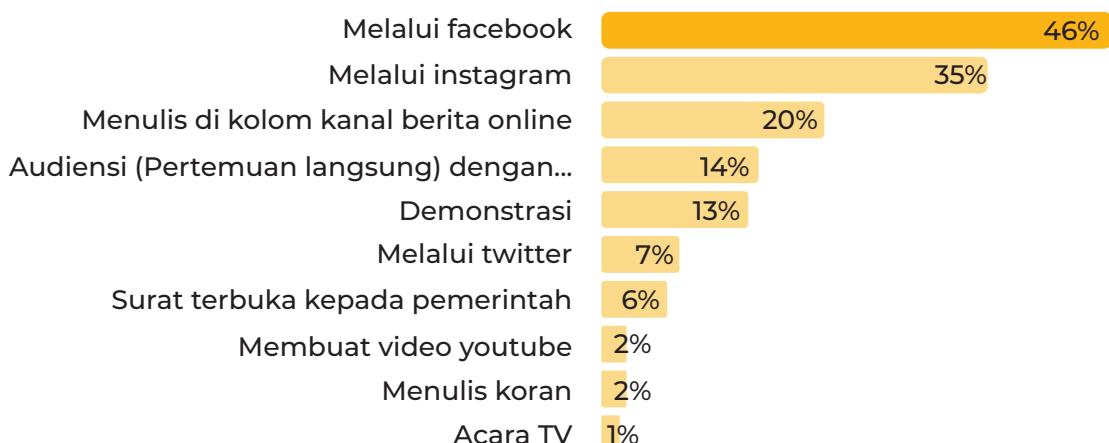


DIAGRAM 3.5: TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPAT/ASPIRASI ANAK MUDA DI PROVINSI RIAU

Anak Muda di Riau menyampaikan Aspirasi/pendapat terkait dengan isu lingkungan kepada pemerintah melalui berbagai cara. Berdasarkan tanggapan dari 400 responden, facebook telah menjadi kanal yang paling banyak responden gunakan (46%). Diikuti oleh media instagram (35%) dan penyampaian opini melalui kolom kanal berita online (20%). Sementara itu, cara yang paling sedikit responden gunakan adalah melalui acara TV (1%) dan dengan menulis opini di koran (2%). Dari grafik tersebut juga dapat kita lihat, walaupun media sosial semakin berkembang, platform twitter (7%) dan youtube (2%) tidak terlalu menarik minat Anak Muda di Riau. Menariknya, demonstrasi masih dianggap sebagai cara yang cukup ampuh dan diminati oleh sebagian responden anak muda dalam mengeluarkan aspirasi/pendapat mereka di isu lingkungan (14%). Terakhir, metode audiensi (14%) dan penyampaian surat terbuka (6%) juga pernah dilakukan oleh Anak Muda sebagai cara untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Apakah Pendapat atau Aspirasi Anda Mendapatkan Respon atau Tanggapan dari Pemerintah Daerah?(N: 400)



GRAFIK 3.1: MEDIA YANG DIGUNAKAN ANAK MUDA UNTUK MENGELOUARKAN ASPIRASI/PENDAPAT TENTANG ISU LINGKUNGAN DI RIAU

BAB 2 PEMBAHASAN

Salah satu alternatif bagi komunitas muda untuk berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di Riau adalah dengan mengikuti kegiatan organisasi lingkungan. Berdasarkan hasil Focus Group Discussion dapat dilihat bahwa di Siak, Sedagho telah melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi Anak Muda dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, khususnya menjelang masa kontestasi politik. Sedagho terlibat secara aktif dalam penyusunan visi dan misi calon kepala daerah yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup.³⁵ Selanjutnya, Sedagho juga mengusulkan skema penandatanganan pakta integritas bagi calon kepala daerah terpilih untuk memenuhi janji-janji kampanyenya.³⁶ Di luar kegiatan politik, Sedagho juga merupakan inisiator terbentuknya Forum Siak Hijau yang terdiri dari berbagai komunitas Anak Muda, seperti komunitas motor, komunitas seni, dan komunitas lainnya.³⁷ Dalam Forum Siak Hijau, Sedagho memberikan sosialisasi terkait kebijakan yang sudah pemerintah daerah ambil untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan di Siak serta evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Sedagho juga menghimpun berbagai masukan dari komunitas-komunitas yang tergabung dalam Forum Siak Hijau. Selain itu, Sedagho Bersama berbagai pihak lainnya juga melakukan aktivitas-aktivitas lapangan yang berkaitan dengan upaya rehabilitasi lingkungan hidup. Tercatat, dari 396 orang responden, terdapat 244 responden yang pernah terlibat dalam jenis kegiatan tersebut (62%) dan 152 responden yang belum pernah terlibat (38%).

AApakah Anda Pernah Terlibat dalam Mengikuti Kegiatan Organisasi Lingkungan?
(N: 396)

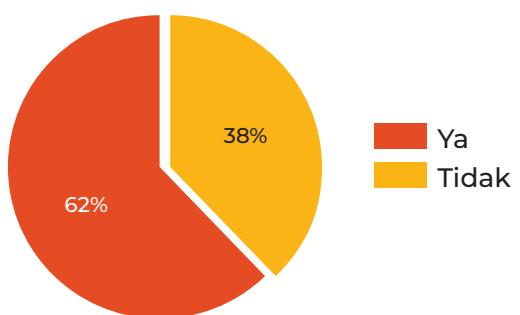


DIAGRAM 3.6: PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM KEGIATAN ORGANISASI LINGKUNGAN DI PROVINSI RIAU

Pada dasarnya, Yayasan Partisipasi Muda melihat bahwa komunitas muda di Provinsi Riau memiliki harapan yang besar agar pemerintah daerah dapat

³⁵ Focus Group Discussion, "Permasalahan Lingkungan dan Partisipasi Politik Anak Muda di Kabupaten Siak", dengan melibatkan 13 Organisasi Masyarakat Sipil di sektor lingkungan maupun komunitas Anak Muda di Kabupaten Siak, pada 23 Oktober 2021, 2 November 2021 dan 16 November 2021

³⁶ Focus Group Discussion, "Permasalahan Lingkungan dan Partisipasi Politik Anak Muda di Kabupaten Siak", dengan melibatkan 13 Organisasi Masyarakat Sipil di sektor lingkungan maupun komunitas Anak Muda di Kabupaten Siak, pada 23 Oktober 2021, 2 November 2021 dan 16 November 2021

³⁷ Focus Group Discussion, "Permasalahan Lingkungan dan Partisipasi Politik Anak Muda di Kabupaten Siak", dengan melibatkan 13 Organisasi Masyarakat Sipil di sektor lingkungan maupun komunitas Anak Muda di Kabupaten Siak, pada 23 Oktober 2021, 2 November 2021 dan 16 November 2021

BAB 2 PEMBAHASAN

menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi. Tentu saja untuk melakukan hal tersebut, diperlukan pendapat/aspirasi anak muda daerah. Beberapa responden di survei kami menyatakan agar kepala daerah terpilih nantinya lebih responsif terhadap persoalan lingkungan dan menerima aspirasi masyarakat yang luas terkait dengan kebijakan yang berdampak pada lingkungan hidup. Dapat dilihat dari sajian diagram di bawah bahwa dari 302 responden anak muda yang menjawab pertanyaan dalam diagram tersebut, terdapat 235 orang responden (78%) yang berharap Pilkada 2020 dapat membawa perubahan terhadap penyampaian aspirasi anak muda terhadap isu lingkungan.

Menurut anda apakah pemilihan kepala daerah 2020 dapat menjadi peluang bagi anak muda untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya terkait isu lingkungan di Provinsi Riau?(N:302)

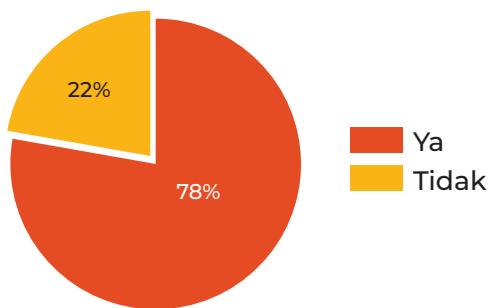


DIAGRAM 3.7: TINGKAT HARAPAN ANAK MUDA DI PROVINSI RIAU TERHADAP PILKADA 2020.

BAB 03

PENUTUP

BAB 3
PENUTUP

KESIMPULAN

Yayasan Partisipasi Muda melihat bahwa isu lingkungan menjadi isu yang menjadi perhatian banyak anak muda di Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat tingginya responden anak muda yang terkena dampak atas kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah tersebut. Namun demikian, cukup disayangkan ketika melihat fakta bahwa anak muda tidak terlalu dilibatkan dalam menyelesaikan masalah lingkungan, termasuk dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Terlebih lagi, banyak hambatan yang dialami oleh anak muda untuk bisa terlibat dalam penyusunan kebijakan lingkungan di Provinsi Riau. Tantangan yang dihadapi adalah tidak banyak anak muda yang dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung dan terlibat dalam penyusunan kebijakan untuk menyelesaikan persoalan lingkungan.

Namun demikian, sempitnya ruang aspirasi itu tidak menyurutkan semangat anak muda di Provinsi Riau untuk menyampaikan aspirasinya kepada para pembuat kebijakan. Justru, anak muda menggunakan berbagai celah untuk bisa melakukan hal tersebut. Misal, dengan menggunakan media sosial, seperti facebook dan instagram. Selain itu, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 juga menjadi cara bagi anak muda di provinsi Riau untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat mereka terkait isu lingkungan. Dengan harapan, pendapat dan aspirasi tersebut dapat membantu menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi di daerah mereka.

REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan, Yayasan Partisipasi Muda memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan sosialisasi terhadap kebijakan lingkungan yang sedang dibuat maupun yang sudah dibuat kepada kaum muda Provinsi Riau agar anak muda bisa terlibat dalam penyusunan kebijakan dan juga pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Pentingnya bagi pemerintah daerah, untuk tidak hanya melibatkan aspirasi anak muda secara reguler dalam membangun kebijakan lingkungan, atau kebijakan pembangunan yang memiliki dampak pada lingkungan namun juga menjadikan masukan dari anak muda untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
3. Pentingnya bagi kelompok muda untuk membangun komunikasi yang lebih efektif kepada pemangku kebijakan terkait dengan aspirasi isu lingkungan di Provinsi Riau.
4. Dibentuknya wadah bagi anak muda Provinsi Riau untuk mengeluarkan aspirasi/ pendapatnya terkait dengan isu lingkungan kepada para pembuat kebijakan.
5. Melakukan pendidikan lingkungan kepada anak muda agar kaum muda di Provinsi Riau memahami pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

BERITA ONLINE

Anggoro, FB. (2021, Maret 9). Lahan gambut Rimbo Panjang-Riau Terbakar, Tim Berjibaku Memadamkan. <https://www.antaranews.com/berita/2034302/lahan-gambut-rimbo-panjang-riau-terbakar-tim-berjibaku-memadamkan#mobile-nav>.

Dwi Nicken Tari. (2020). Teken MoU dengan Bappenas, Riau Jadi Provinsi Percontohan Rendah Karbon.

Hasanuddin, Sulthony. (2020, Oktober 31). Malapetaka Deforestasi Hutan Alam. <https://akurat.co/news/id-1229941-read-malapetaka-deforestasi-hutan-alam-riau>. Kurnia, Febri. (2019, Oktober 09). Peran Masyarakat Dibutuhkan Redam Pencemaran DAS di Riau. <https://www.gatra.com/detail/news/449891/kebencanaan/peran-masyarakat-dibutuhkan-redam-pencemaran-das-di-riau>.

Kurnia, Febri. (2020, Juli 28). Perusahaan Sawit di Riau Diduga Buang Limbah ke Sungai. <https://www.gatra.com/detail/news/485910/kebencanaan/perusahaan-sawit-di-riau-diduga-buang-limbah-ke-sungaipada>.

Kurnia, Febri (2021, Januari 11). Pengamat: Program Riau Hijau Perlu Ditinjau Ulang. <https://www.gatra.com/detail/news/500570/kebencanaan/pengamat-program-riau-hijau-perlu-ditinjau-ulang>.

Kurnia, Febri. (2021, Januari 28). Industri Ekstraktif Picu Bencana Banjir Tahunan di Riau. <https://www.gatra.com/detail/news/502204/kebencanaan/industri-ekstraktif-picu-bencana-banjir-tahunan-di-riau#:~:text=%22Perusakan%20hutan%20alam%20di%20kawasan,di%20Riau%2C%22%20jelas%20Okto>.

Luis, Silvia Triyanti. (2019, September 30). Jumlah Penderita ISPA Akibat Karhutla Capai 919.516 Orang di Bulan September. <https://nationalgeographic.grid.id/read/131864595/jumlah-penderita-ispa-akibat-karhutla-capai-919516-orang-di-bulan-september?page=all>.

Nofitra, Rian. (2019, Desember 22). Banjir Riau Disebut Akibat Hutan Berubah Fungsi dan Rusa. <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2019/12/22/banjir-riau-disebut-akibat-hutan-berubah-fungsi-dan-rusak>.

Rahim, Rahmad. (2019, April 19). RPJMD Hijau 2019-2024. <https://www.goriau.com/berita/baca/rpjmd-hijau-20192024.html>.

RiauPos.Co. (2019, September 20). Menteri LHK Tetapkan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Tahun 2019. <https://riaupos.jawapos.com/>

DAFTAR PUSTAKA

<advertorial/20/09/2019/209216/menteri-lhk-tetapkan-peta-indikatif-penghentian-pemberian-izin-baru-tahun-2019.html>.

Siregar, Tongkulem. (2019, November 22). Tingkat Pencemaran Sungai di Riau Tinggi. <https://rri.co.id/pekanbaru/daerah/750106/tingkat-pencemaran-sungai-di-riau-tinggi>.

Suryadi. (2019, Januari 22). Pabrik Sawit Cemari Sungai di Siak, Bagaimana Penanganannya?. <https://www.mongabay.co.id/2019/01/22/pabrik-sawit-cemari-sungai-di-siak-bagaimana-penanganannya/>

Suryadi. (2019, Maret 22). Sungai Kampar Tercemar, Adakah Upaya Pemulihan?. <https://www.mongabay.co.id/2019/03/22/sungai-kampar-tercemar-adakah-upaya-pemulihan/>.

Tanjung, Idon. (2019, Desember 20). Sebanyak 62.630 Jiwa di 6 Kabupaten Terdampak Banjir di Riau Sejak Pertengahan November. <https://regional.kompas.com/read/2019/12/20/21292801/sebanyak-62630-jiwa-di-6-kabupaten-terdampak-banjir-di-riau-sejak?page=all>

FOCUS GRUP DISCUSSION

Focus Group Discussion, "Permasalahan Lingkungan dan Partisipasi Politik Anak Muda di Kabupaten Siak", bersama 13 Organisasi Masyarakat, 23 Oktober 2021, 2 November 2021 dan 16 November 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

PUBLIKASI

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2020). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Riau Tahun 2011 – 2019. <https://riau.bps.go.id/dynamictable/2020/03/19/88/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-riau-2011---2019.html>.

Kabupaten Lestari. (2019, Oktober 8). Kabupaten Hijau, Kolaborasi Kabupaten Siak Cegah Karhutla. <https://kabupatenlestari.org/berita/read/kabupaten-hijau-kolaborasi-kabupaten-siak-cegah-karhutla>.

Karhutla Monitoring Sistem. Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2020. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran.

**DAFTAR
PUSTAKA**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Deforestasi Indonesia Tahun 2017-2018.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2017). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2016.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2017.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2018.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2020). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2019

PUBLIKASI

Generasi Melek Politik. (2020). Survey Partisipasi Politik Lingkungan Bagi Anak Muda di Provinsi Riau.

